

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN DI KOTA MALANG

(Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Arif Citra Permana, Cahyo Sasmito, Cakti Indra Gunawan.

Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

E-mail : arif.cepe@gmail.com

Abstrak

Program Keluarga Harapan merupakan program untuk memutus rantai kemiskinan. Kota Malang menerimanya tahun 2013. Pemberdayaan masyarakat dalam PKH ini merupakan langkah percepatan untuk pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) implementasi pemberdayaan masyarakat, (2) faktor pendukung dan penghambat, dan (3) dampak implementasi pemberdayaan masyarakat dalam Program Keluarga Harapan untuk memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa implementasi pemberdayaan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah pembenahan kualitas hidup para peserta PKH dengan memperbaiki aspek kesehatan dan pendidikan keluarga, berperan aktifnya para peserta PKH dalam mensukseskan program ini, dan terlibatnya para peserta PKH dalam sosialisasi hal – hal yang baik kepada masyarakat sekitarnya. Faktor pendukung yaitu keberadaan pendamping PKH, keaktifan pemerintah daerah serta kemauan masyarakat peserta program ini untuk menjadi lebih baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah ketidaksiapan program dalam hal peraturannya dan kesiapan para stakeholder program ini. Dampak implementasinya dapat terlihat dari membaiknya status kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan peserta Program Keluarga Harapan di Kota Malang.

Kata kunci : *Kemiskinan; Pemberdayaan Masyarakat; Program Keluarga Harapan.*

Abstract

Family Hope program is a program to break the chains of poverty. Malang received it the year 2013. Community empowerment in the PKH step acceleration for poverty reduction. This research aims to analyze (1) implementation of community empowerment, (2) factor endowments and a barrier, and (3) the impact of the implementation of community empowerment in the family Program Hopes to break the chains of poverty in Sub Lowokwaru Malang. The research was conducted using qualitative methods. Based on research it was concluded that the implementation of empowerment in the implementation of the Program of family Expectations are improving the quality of life of participants PKH by improving family health and educational aspects, the active role of the participants PKH in this program, the national program and the involvement of the participants in the PKH socialization thing – a good thing to the surrounding community. Supporting factors, namely the existence of a companion PKH, liveliness of local government as well as the willingness of community participants of this program to get better. While the factor penghambatnya is a program in terms of the rule of unpreparedness and the readiness of the program stakeholders. The impact of the implementation can be seen in improving the status of the health, education and welfare of the Family Hope Program participants in the city of Malang.

Keywords: *Poverty; Community Empowerment; Family Program Expectations.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia adalah kasus dan permasalahan sosial yang selalu menjadi kajian yang tak pernah selesai. Kemiskinan selalu menjadi perhatian dari pemerintahan Indonesia, baik pusat maupun daerah. Menurut Auliyah H, dkk (2013), kemiskinan dapat menyebabkan efek yang cenderung menyebar (multiplier effects) bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dimana kebutuhan dasar masyarakat tidak mampu untuk dipenuhi. Sehingga keanekaragaman persoalan kemiskinan memerlukan upaya penyelesaian dan pencegahan yang lengkap dan menyeluruh, mencakup berbagai macam aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu dan terorganisir secara baik. Menurut Susi L. Rita Y.I (2013), Yepi Y. (2014), kemiskinan yang perlu di selesaikan paling utama adalah kemiskinan dalam bidang pendidikan dan kesehatan, karena dua hal tersebut merupakan dua pilar penting pengentasan kemiskinan dalam suatu negara.

Di Indonesia sendiri menurut BPS, pada awal tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia yang terdeteksi ada di bawah garis kemiskinan mencapai 28,6 juta orang atau 11,22% dari jumlah total penduduk Indonesia yang menyebar diberbagai provinsi yang ada. Dan di Kota Malang sendiri jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan di tahun yang sama sebesar 4,84% dari total jumlah penduduk 900 ribu jiwa yang terdapat di 5 kecamatan yang ada. Pemerintah Indonesia sendiri telah konsisten menyelenggarakan berbagai macam program pengentasan kemiskinan yang salah satunya adalah Program Keluarga Harapan. Dimana dalam beberapa tahun ini, pemberdayaan masyarakat telah diuji cobakan di PKH. Pemerintah berharap dengan adanya pemberdayaan ini, para peserta program bisa segera mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri untuk lepas dari kemiskinan yang selama ini menjadi permasalahan yang tak kunjung tuntas.

Dengan masuknya pemberdayaan masyarakat dalam program ini perlu adanya pemahaman mengenai implementasi pemberdayaannya, faktor pendukung dan faktor penghambatnya serta dampak yang bisa diberikan dalam pelaksanaan

pemberdayaan dalam memutuskan rantai kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Implementasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2016) menyimpulkan bahwa implementasi itu merupakan tindakan – tindakan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang direncanakan melalui program – program yang disusun oleh para pejabat pemerintahan. Sedangkan V. Meter dan V. Horn dalam Winarno (2016) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh individu - individu atau organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta yang ditujukan untuk mencapai hasil - hasil yang telah disepakati dalam keputusan - keputusan kebijakan sebelumnya. Sehingga implementasi merupakan segala tindakan membuat menjadi nyata suatu aturan dan keputusan yang telah disepakati dan disahkan sebelumnya.

Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dijelaskan dalam Undang-undang Kesejahteraan Sosial No. 11 Tahun 2009 pasal 1 yang berbunyi “Kesejahteraan sosial adalah kondisi tercukupinya keperluan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup dengan layak dan dapat mengembangkan kualitas diri, supaya dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Menurut Suryono (2014) bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keamanan, kesopanan dan ketenangan lahir dan batin, yang membuat setiap warga Negara merasa nyaman untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan - kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial dengan sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. Dan tercapainya kesejahteraan sosial ketika (1) segala permasalahan sosial yang ada dapat ditangani, (2) kebutuhan-kebutuhan dapat terpenuhi, dan (3) kesempatan-kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.(Suhendi, 2013)

Teori dan Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi dimana terjadi ketidak mampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat terlihat dari banyak dimensi, dan untuk menggambarkan banyak dimensi kemiskinan digunakan istilah yang dikenal dengan “*plural poverty*”, yakni kurang mampunya masyarakat untuk mengakses segala kebutuhan dasar yang penting bagi dirinya. (Siti, 2013)

Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan meliputi pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya ditujukan untuk mempermudah akses bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mengadakan proses produksi dan kesempatan berusaha.(Makianggung, 2016). Sehingga terdapat tiga hal pokok dalam pemberdayaan yaitu (1) Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual, (2) Akses yang mudah kesegala sumber daya pengembangan diri, (3) Organisasi dan kelompok yang selalu mendukung pengembangan diri.

Program Keluarga Harapan

PKH adalah program unggulan lintas sektor dimana pelakunya adalah berbagai instansi pemerintahan, dimana tujuan utamanya adalah memutuskan dan menghilangkan rantai kemiskinan yang selama ini menjadi penyakit dalam pembangunan negara (Pedoman Umum PKH, 2012). Menurut Purwanto dkk (2013), PKH merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu pesertanya dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Dan pada beberapa tahun ini, PKH melakukan uji coba pemberdayaan masyarakat melalui kelompok - kelompok usaha bersama miliki para peserta PKH. Dimana diharapkan dengan adanya kelompok usaha ini proses pengentasan kemiskinan bisa segera terwujud dan menambah nilai positif bagi pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana menurut Sugiyono (2014), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berhubungan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran suatu konsep atau gejala. Dan metode kualitatif sebagai langkah – langkah penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa hasil wawancara dari para informan dan berbagai perilaku yang dapat diamati saat di tempat penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Data Primer diperoleh dengan wawancara informan, sedangkan data sekunder diperoleh mencari dokumen-dokumen yang sesuai dengan tema penelitian. Analisis datadilakukan dengan menggunakan Milesdan Huberman model interaktif, analisis fokus sebagai kelanjutan proses dari pengumpulan data dan kesimpulan pembuatan.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 11 informan yaitu; Kepala Dinas Sosial; Camat Lowokwaru, Lurah Tunggulwulung, Kordinator PKH; Operator PKH; 3 orang pendamping PKH; 2 orang ketua Kelompok Usaha Bersama; dan beberapa Peserta PKH sebagai pelengkap informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Implementasi Pemberdayaan

Dengan bercermin melalui konsep pemberdayaan dalam membangun masyarakat (*community development*) agar dapat memperbaiki kualitas kehidupan serta mengembangkan segala kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat miskin. Dimana implementasi itu dilaksanakan melalui 3 bidang penting dalam PKH yaitu: (1) Bidang kesehatan, dengan kemauan dan peningkatan kepedulian terhadap keadaan kesehatan keluarga. Dengan menyukseskan program posyandu dan kepedulian terhadap kesehatan ibu hamil, nifas serta balita dalam keluarga. Serta kepedulian kesehatan terhadap sesama dengan menularkan hal – hal yang

bermanfaat kepada tetangga – tetangganya. Sehingga kebiasaan hidup sehat bisa terlaksana dengan otomatis di kehidupan bermasyarakat. (2) Bidang Pendidikan, keluarga menjadi lebih memperhatikan akan keperluan dan kebutuhan anak – anaknya dalam menimba ilmu di bangku sekolah. Sehingga orang tua peserta PKH lebih mengutamakan masa depan yang akan diperoleh daripada menyuruh anak untuk bekerja untuk mencukupi segala keperluan keluarganya. (3) Bidang Kesejahteraan Sosial, dimana merupakan hal yang sangat baru di dalam program ini. Dengan tujuan memandirikan para peserta PKH dengan pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) yang mana nantinya di harapkan bisa menambah kreatifitas serta menambah penghasilan bagi para anggotanya.

Sehingga dari pemberdayaan masyarakat sendiri yang perlu diperhatikan adalah tiga hal dan harus segera difokuskan yaitu : (a) Pengetahuan dasar yang dipunyai para peserta PKH dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan pemberdayaan, juga termasuk keterampilan intelektual para pesertanya. (b) Memperoleh akses yang maksimal ke sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pengembangan diri bagi peserta PKH. (c) Terbentuknya kelompok usaha bersama (KUBE) yang mana membuat para peserta PKH dapat menjadi produktif dan kreatif dalam melakukan peningkatan pendapatan bersama dan keluarga.

Dimana dalam pelaksanaan implementasi sendiri juga tetap melihat pada faktor – faktor yang dikemukakan oleh George Edward (dalam Winarno, 2016) yaitu : (a) Komunikasi, dimana terlihat bahwa komunikasi dari pendamping ke keluarga penerima manfaat sudah berjalan sangat baik. Hal tersebut dilaksanakan melalui adanya pertemuan kelompok yang dilakukan tiap bulan untuk melakukan sharing bersama – sama. Dimana pertemuan kelompok ini merupakan kewajiban utama dari para penerima program. Sehingga dalam pertemuan bulanan ini para peserta wajib datang dan berkumpul bersama - sama. Disinilah proses komunikasi bisa di laksanakan sebaik mungkin. (b) Sumber daya dimana sudah mulai bisa dicapai walau dengan skala kecil. Karena para peserta program merupakan keluarga yang memiliki pendidikan rendah sehingga perlu perhatian ekstra dalam penyampaian segala informasi. Diimbangi lagi dengan keadaan ekonomi yang

belum cukup, hal ini yang masih berusaha diperbaiki dan ditingkatkan. Diharapkan dengan dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat ini keadaan sumber daya akan lebih baik sehingga implementasi program bisa segera tercapai sesuai sasaran yang diinginkan. (c) Kecenderungan – kecenderungan yang mana pemerintah daerah dan *stakeholder* telah berpartisipasi dalam implementasi program ini. Dengan mendukung dan menyelenggarakan segala kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari para keluarga penerima manfaat. Dimana pemerintah daerah sudah menganggarkan secara khusus anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Malang. Dengan adanya dukungan penuh dari setiap pelaku program membuat semakin mudahnya dan cepatnya implementasi bisa dilaksanakan. (d) Struktur birokrasi disini adalah pelaksana yang profesional dan handal yang mana di dalamnya ada kordinator wilayah, operator dan pendamping PKH yang dengan tupoksinya selalu mendukung jalannya implementasi pemberdayaan dalam Program Keluarga Harapan di Kota Malang. Dibantu dengan pihak Dinas Sosial Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru dan Kelurahan – Kelurahan yang berada di Kecamatan Lowokwaru.

2. Faktor Pendukung

Keberhasilan implementasi pemberdayaan dalam PKH sendiri dapat terwujud jika faktor – faktor yang menjadi pendukungnya bisa berjalan secara maksimal sebagaimana fungsinya. (1) Peran aktif pendamping PKH, dimana menjadi pelaku utama dalam program ini. Dimana dengan berperan aktifnya pendampingan di dalam program ini akan membuat pemberdayaan masyarakat dapat lebih cepat terlaksana. (2) Peran aktif pemerintah daerah, keikutsertaan pemerintah daerah dalam program PKH sangat diperlukan sebagai penunjang dan pelengkap. Yang mana pemerintahan daerah dengan anggarannya dapat mengadakan bermacam - macam kegiatan yang bermanfaat bagi para peserta, baik dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberian tambahan modal usaha, serta pendampingan tambahan lainnya. (3) Kemauan Masyarakat Peserta PKH menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung program ini. Dimana masyarakat tersebut mau berubah atau tidak menjadi keputusan langsung bagi

para peserta PKH. Sebagus apapun program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan jika tidak diimbangi dengan kemauan untuk berubah dari penerimanya maka akan tetap sama seperti sebelum menerima bantuan.

3. Faktor Penghambat

Terdapat faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian di lapangan adalah (1) Kesiapan aturan – aturan yang mengatur program ini, dimana aturan program yang masih berubah – ubah membuat implementasi dilapangan menjadi sulit. Hal ini dikarenakan pemberdayaan bagi masyarakat dalam program PKH masih merupakan *pilot project* dimana masih belum ditetapkan rumusan yang sesuai dan tetap untuk berjalannya pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan. (2) Kesiapan *stakeholder* dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, kesiapan *stakeholder* ini mungkin dampak dari ketidaksiapan serta kejelasan dari peraturan yang telah dibuat. Sehingga membuat para *stakeholder* harus dengan cepat menyesuaikan dengan keadaan yang ada.

4. Dampak Implementasi Pemberdayaan Masyarakat

Dampak yang ditemukan saat penelitian adalah (1) Bidang Kesehatan, Masyarakat mulai peduli dengan kesehatan keluarganya melalui : pemeriksaan bulanan bagi ibu hamil, persalinan kelahiran di fasilitas kesehatan yang profesional dan mumpuni, pemeriksaan rutin bagi ibu nifas, penyuksesan program posyandu pada semua lapisan masyarakat, penimbangan rutin balita, imunisasi lengkap bagi para balita, pemberian vitamin tambahan bagi balita, pengecekan kesehatan bagi semua anggota keluarga. (2) Bidang Pendidikan, para orangtua mulai sadar akan pentingnya bangku sekolah bagi kelanjutan masa depan anak – anak penerus keluarga. Sehingga para peserta PKH yang mempunyai anak yang putus sekolah segera mulai membujuk, mencarikan serta menyekolahkan kembali anaknya tersebut. Kemudian perhatian lebih diberikan bagi anak – anak yang bermasalah dengan kehadiran di sekolahnya. Memang program ini masih melihat kehadiran bukan prestasi namun dengan kehadiran anak yang tinggi disekolah diharapkan dapat membuat anak tersebut bisa menerima pelajaran dengan lengkap. (3) Bidang Kesejahteraan Sosial, peningkatan kesejahteraan bagi tiap keluarga peserta program adalah tujuan utama dari adanya pemberdayaan

masyarakat dalam PKH. Sehingga dengan adanya kelompok – kelompok usaha bersama(KUBE) dapat meningkatkan kreatifitas serta penghasilan mereka. Sehingga peningkatan status dari keluarga sangat miskin menjadi status yang berada diatasnya serta menjadi masyarakat yang mandiri dan berdikari bisa segera diwujudkan. Hal tersebut menandakan bahwa Program Keluarga Harapan dengan pemberdayaan masyarakat telah berhasil di implementasikan untuk memutuskan rantai kemiskinan.

KESIMPULAN

Implementasi pemberdayaan masyarakat dalam PKH dapat terlaksana dengan : (a) Pembinaan kualitas hidup para peserta PKH dengan memperbaiki aspek kesehatan dan pendidikan keluarga. (b) Berperan aktifnya para peserta program dalam mensukseskan program ini, dimana program ini dijadikan program pemberdayaan masyarakat yang baik melalui kelompok usaha bersamanya. (c) Terlibatnya para peserta program dalam sosialisasi hal – hal yang berguna dan baik kepada masyarakat sekitarnya, hal ini menjadikan para peserta PKH menjadi pendukung kegiatan – kegiatan pemerintah secara tidak sadar.

Faktor pendukung implementasi pemberdayaan masyarakat dalam PKH adalah keberadaan pendamping PKH, peran aktif dari pemerintah daerah dan kemauan peserta PKH untuk mau berubah dan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya secara mandiri.

Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat dalam program ini adalah ketidaksiapannya program ini sehingga aturan – aturan yang mengaturnya masih sering berganti – ganti. Dan yang berpengaruh selanjutnya adalah kesiapan *stakeholder* dalam mensukseskan dan menyokong program ini.

Dampak implementasi pemberdayaan masyarakat dalam PKH adalah (1) Meningkatnya kepedulian akan kesehatan keluarga, (2) Meningkatnya kepedulian keluarga akan pendidikan yang tinggi bagi anak – anak dalam keluarganya, (3) Dalam kesejahteraan sosial sendiri bahwa dengan adanya pemberdayaan maka para peserta program bisa lebih mandiri dan berdaya dalam melihat peluang – peluang baru untuk menambah penghasilan keluarganya.

SARAN

1. Dalam implementasi terkadang ada ketidaksinkronan dengan tujuan program sehingga diperlukan pengawasan dan pemantauan yang lebih mendalam, serta penguatan sumber daya manusia kepada penerima manfaat agar bisa lebih berkomitmen dengan peraturan yang telah ada.
2. Perlunya penelitian secara khusus mengenai kondisi masyarakat yang miskin di lapangan dari segi kebutuhan serta kemauan melakukan tindakan, sehingga diperoleh hasil untuk menunjang perumusan kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat terutama dalam pemutusan rantai kemiskinan dan menjadikan masyarakat miskin tersebut menjadi lebih berdaya dan mandiri.
3. Pembuatan kebijakan perlu memperhatikan kondisi riil dilapangan dan melibatkan semua pihak terkait (*stakeholder*), sehingga dalam pembuatan kebijakan harus ada sosialisasi dan kordinasi yang menyeluruh dan mendalam sebagai langkah meminimalisir munculnya permasalahan ketika diimplementasikan. Serta peran serta *stakeholder* dalam sosialisasi implementasi kebijakan akan sangat membantu penyuksesan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suryono, 2014. Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. Transparansi, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, vol 6, no 2, 98-102
- Ahmad Suhendi, 2013. Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Jurnal Informasi, vol 18, no 2, 105-116
- Auliyah Husnah, Hermawan dan Abdul Wachid. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Jalin Kesra (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat) Sebagai Upaya Mendukung Pencapaian Target MDG's (Millenium Development Goals) Di Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Crisis Center Pendampingan Provinsi Jawa Timur). JAP Vol 1, No 3, 9-17

- Kementrian Sosial RI. 2012. Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH). Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial RI.
- Purwanto SA, Sumartono, Makmur M. 2013. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). Jurnal Wacana, vol 16, no 2, 79-96
- Siti Internawati, 2013. Studi Pelaksanaan Pendataan Keluarga Miskin Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan. Jurnal Administrasi Negara, vol 1, no 2, 309-323
- Sugiyono, 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan D&R, Bandung : Alfabeta
- Susi L. dan Rita Y.I 2012. Analisis Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi Riau. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan 7, 71-87
- Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009. *Tentang Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Aneka Ilmu.
- Vanni Junaidi Makiangung. 2014. Pemberdayaan Masyarakat Usaha Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Matuari Kota Bitung.
- Yepi Yigibalom. 2014. Efektivitas Program Beras Untuk Keluarga Miskin Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya. Jurnal Administrasi Publik, 120-135
- Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Public Era Globalisasi Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif. Yogyakarta: CAPS.